

Memperkuat Sinergi:

Kemhub Transformasi Skema
Konsesi untuk Masa Depan
Kepelabuhanan Nasional





Liana Trisnawati
Ketua Umum

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Newsletter ABUPI edisi Februari 2026 dapat kembali hadir sebagai ruang berbagi informasi, gagasan, serta perkembangan terkini bagi seluruh anggota dan pemangku kepentingan sektor kepelabuhanan nasional.

Memasuki bulan Februari 2026, berbagai dinamika di sektor maritim, transportasi, dan logistik terus mendorong perlunya penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan jejaring kerja sama antar pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, penguatan ekosistem industri pelabuhan tidak hanya berkaitan dengan aspek operasional, tetapi juga mencakup pengembangan standar kompetensi, keselamatan kerja, serta kolaborasi lintas sektor yang semakin strategis.

Sepanjang bulan ini, ABUPI berpartisipasi dalam berbagai forum diskusi, kegiatan penguatan kapasitas, serta agenda kerja sama yang melibatkan pemangku kepentingan nasional maupun internasional. Kegiatan tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memperkuat sinergi industri, menjajaki peluang kolaborasi baru, serta memperluas jejaring kemitraan yang dapat mendukung pengembangan sektor kepelabuhanan dan logistik Indonesia.

Melalui edisi newsletter ini, ABUPI merangkum berbagai aktivitas dan perkembangan yang berlangsung sepanjang Februari 2026. Kami berharap informasi yang disampaikan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat serta memperkuat semangat kolaborasi seluruh anggota dalam menghadapi peluang dan tantangan industri kepelabuhanan ke depan.

Akhir kata, ABUPI akan terus berkomitmen menjadi mitra strategis dalam mendukung penguatan industri pelabuhan nasional serta mendorong terciptanya sistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing.

MEMPERKUAT SINERGI: TRANSFORMASI SKEMA KONSESI UNTUK MASA DEPAN KEPELABUHANAN NASIONAL



Kementerian Perhubungan terus melakukan penguatan tata kelola infrastruktur maritim melalui penyesuaian regulasi terkait skema konsesi bagi Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyelaraskan dinamika industri dengan kebutuhan pengembangan pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia. Melalui kebijakan tersebut, sektor swasta diberikan ruang yang lebih jelas untuk berpartisipasi dalam pengelolaan infrastruktur guna mendukung percepatan pembangunan fasilitas pelabuhan nasional yang lebih merata.

Penerapan skema konsesi yang diperbarui ini menciptakan iklim usaha yang lebih terukur serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Salah satu poin krusial adalah implementasi standarisasi fee konsesi, di mana pemerintah mulai menerapkan besaran kontribusi tetap berkisar antara 5% hingga 7,5% dari pendapatan kotor, tergantung pada kesepakatan spesifik. Langkah ini diambil untuk menciptakan keseragaman antar pelabuhan, sekaligus menjamin kualitas layanan jasa kepelabuhanan tetap terjaga melalui standar operasional yang ketat.

Implementasi kebijakan ini telah memasuki tahap konkret sejak Februari 2026, yang ditandai dengan intensifikasi penandatanganan perjanjian konsesi antara pemerintah dan berbagai entitas usaha. Fokus utama dari langkah ini adalah untuk mengoptimalkan potensi aset negara dan memastikan distribusi peran yang lebih efektif dalam pengelolaan logistik nasional. Melalui momentum tersebut, setiap unit usaha kini memiliki acuan waktu dan kewajiban administratif yang lebih jelas guna mendukung transparansi dalam operasional kepelabuhanan.

Selain aspek administratif, regulasi ini juga mendorong para pengelola pelabuhan untuk terus meningkatkan efisiensi melalui inovasi dan modernisasi sistem secara berkelanjutan. Kehadiran berbagai entitas usaha dalam pengelolaan pelabuhan diharapkan mampu memicu peningkatan standar pelayanan yang lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan pelabuhan sebagai pilar utama yang mendukung kelancaran rantai pasok baik di tingkat domestik maupun global.

ABUPI RESMI BERMITRA DENGAN MACN UNTUK PENGUATAN GOOD GOVERNANCE KEPELABUHANAN



Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Maritime Anti-Corruption Network (MACN) sebagai wujud komitmen terhadap penerapan tata kelola bisnis yang bersih, transparan, dan berintegritas di sektor kepelabuhanan. Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat upaya kolektif pencegahan praktik korupsi dan peningkatan standar etika bisnis di lingkungan pelabuhan Indonesia.



Kemitraan strategis ini bertujuan untuk memperkuat promosi integritas serta mendorong aksi kolektif antara sektor publik dan swasta dalam industri maritim Indonesia. Penandatanganan MoU tersebut dihadiri oleh Ketua Umum ABUPI, Liana Trisnawati, jajaran pengurus DPP dan DPD ABUPI, serta perwakilan manajemen MACN, termasuk Martin Benderson (Chief Partnership Officer) dan Rizal Hadi (Senior Advisor MACN).

Melalui kolaborasi ini, ABUPI dan MACN berkomitmen untuk membangun ekosistem maritim yang berintegritas, tepercaya, dan berkelanjutan melalui program pelatihan, edukasi, serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan.

Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kepercayaan, meningkatkan kepastian usaha, serta menciptakan iklim bisnis kepelabuhanan yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia.



ABUPI MENGHADIRI BILATERAL MARITIME FORUM REPUBLIK INDONESIA-BELANDA KE-6



Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menghadiri Bilateral Maritime Forum (BMF) RI-Belanda ke-6 yang diselenggarakan pada 10-12 Februari 2026 di Wassenaar, Belanda. Kehadiran ABUPI merupakan bagian dari delegasi Republik Indonesia dalam forum strategis dua tahunan yang mempertemukan perwakilan pemerintah, otoritas maritim, serta pelaku industri kedua negara untuk memperkuat kerja sama di sektor kemaritiman.



Forum ini membahas berbagai isu prioritas, antara lain pengembangan pelabuhan berkelanjutan, peningkatan efisiensi logistik, digitalisasi layanan kepelabuhanan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia maritim. Dalam kegiatan tersebut, ABUPI diwakili oleh Wakil Ketua Umum II, Muhammad Willy, yang turut berpartisipasi dalam rangkaian diskusi dan pertemuan bilateral.

Partisipasi ABUPI pada forum ini mencerminkan peran aktif dalam mendukung diplomasi maritim Indonesia sekaligus mendorong kolaborasi antara pelaku usaha pelabuhan Indonesia dan Belanda, khususnya dalam pertukaran pengetahuan, penguatan tata kelola, serta peluang investasi dan pengembangan teknologi di sektor kepelabuhanan.



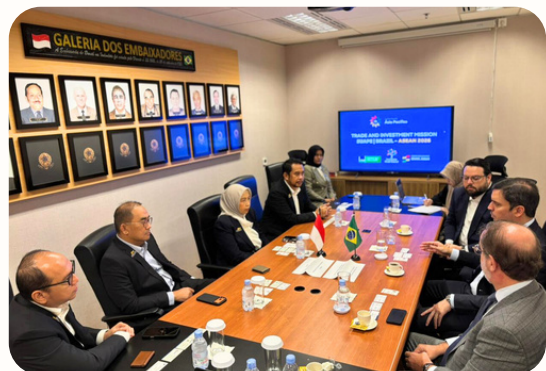
ABUPI & SUAPE INDUSTRIAL PORT COMPLEX BRAZIL JAJAKI KERJASAMA



Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menerima kunjungan kehormatan (courtesy visit) dari delegasi Brazil-ASEAN Parliamentary Front yang didampingi perwakilan dari Suape Industrial Port Complex pada Kamis, 26 Februari 2026. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut komunikasi resmi dari Embassy of the Federative Republic of Brazil terkait agenda pertemuan bilateral antara kedua pihak.

Delegasi dipimpin oleh Marcelo Koiti Hasunuma selaku Head of Trade Promotion and Economic Office, bersama jajaran perwakilan parlemen dan otoritas pelabuhan Brasil. Pertemuan ini menjadi forum dialog strategis untuk memperkuat hubungan kelembagaan serta menjajaki potensi kerja sama konkret di sektor kepelabuhanan, perdagangan, dan logistik.

Dalam diskusi, kedua belah pihak membahas peluang kolaborasi dalam pengembangan pelabuhan berkelanjutan, peningkatan efisiensi rantai pasok, serta pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik (best practices) pengelolaan pelabuhan. Kehadiran perwakilan dari Suape Industrial Port Complex—salah satu pusat logistik dan industri utama di Brasil—membuka ruang eksplorasi kerja sama yang berorientasi pada peningkatan konektivitas maritim Indonesia-Brasil.



ABUPI menyambut baik inisiatif ini sebagai bagian dari komitmen organisasi dalam memperluas jejaring internasional dan memperkuat posisi pelaku usaha pelabuhan Indonesia di tingkat global. Melalui kemitraan strategis lintas negara ini, ABUPI terus mendorong inovasi, kolaborasi, dan peningkatan daya saing industri kepelabuhanan nasional di kancah internasional.

KADIN INDONESIA : DISKUSI KEMARITIMAN DENGAN DELEGASI BRAZIL-ASEAN PARLIAMENTARY FRONT



Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menghadiri undangan pertemuan strategis yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) bersama delegasi Brazil–ASEAN Parliamentary Front dan pimpinan Suape Industrial Port Complex pada Kamis, 26 Februari 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta

Pertemuan ini merupakan bagian dari agenda penguatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Brasil, khususnya dalam menjajaki peluang kolaborasi konkret di berbagai sektor strategis. Diskusi difokuskan pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, peningkatan efisiensi logistik dan rantai pasok, transisi energi, serta pengembangan kawasan industri dan proyek strategis nasional.

Delegasi Brazil–ASEAN Parliamentary Front hadir dengan mandat untuk memperluas hubungan ekonomi dan kerja sama bilateral, didampingi oleh jajaran pimpinan Suape Industrial Port Complex sebagai salah satu pusat industri dan logistik utama di Brasil. Forum ini menjadi ruang dialog bisnis yang produktif antara pelaku usaha kedua negara untuk mengidentifikasi potensi kemitraan yang saling menguntungkan.

Kehadiran ABUPI dalam pertemuan ini mencerminkan komitmen organisasi dalam memperkuat jejaring internasional dan membuka peluang kerja sama baru bagi anggota, khususnya dalam pengembangan sektor kepelabuhanan dan logistik. Melalui partisipasi aktif dalam forum strategis ini, ABUPI terus mendorong sinergi global guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekosistem maritim Indonesia.

nya dalam menjajaki peluang kolaborasi konkret di berbagai sektor strategis. Diskusi difokuskan pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, peningkatan efisiensi logistik dan rantai pasok, transisi energi, serta pengembangan kawasan industri dan proyek strategis nasional.

MEMAKNAI HARI K3 NASIONAL, ABUPI TEGASKAN K3 SEBAGAI INVESTASI MASA DEPAN PELABUHAN

WEBINAR SERIES 2026

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
"Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional di Pelabuhan yang Profesional, Andal, & Kolaboratif"

Kamis 5 Februari 2026 | Start From 14.00 - 16.00 WIB | Meeting ID: 909 689 1138 | Passcode: ABUPI 2026

JOKO M. SLAMET
Assessor LSP Pelabuhan

ZAENAL ABDUL RAHMAN
Kasubdit Manajemen Informasi & Operasional Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan

IVANDA FIRDAUSSY
HSSE Enforcer PT Pelabuhan Tegar Indonesia

ADINDA FADIA
Moderator

REGISTER NOW
bit.ly/WebinarSeriesABUPI2026

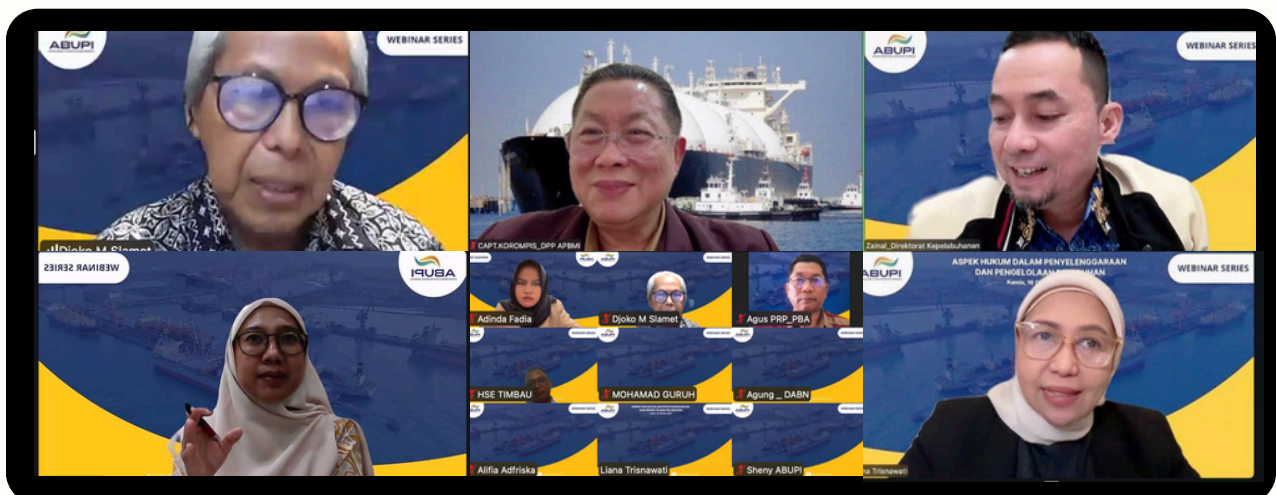
abupi_indonesia | www.abupi.or.id | +62 813-8823-4109

Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia menyelenggarakan diskusi nasional secara daring dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Webinar bertema "Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional di Pelabuhan yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif" ini menjadi bagian dari komitmen ABUPI dalam mendorong penguatan budaya keselamatan di sektor pelabuhan nasional.

Ketua Umum ABUPI, Liana Trisnawati, yang menegaskan bahwa penerapan K3 merupakan aspek fundamental dalam operasional pelabuhan. Ia menyampaikan bahwa K3 tidak hanya melindungi tenaga kerja, tetapi juga mendukung produktivitas, kelancaran operasional, serta terciptanya iklim investasi yang berkelanjutan.

Diskusi menghadirkan narasumber berpengalaman di bidang kepelabuhanan dan K3, yaitu Drs. Joko M. Slamet, MM., Assessor LSP Pelabuhan; Zainal Abdul Rahman, S.H., M.H., Kasubdit Manajemen Informasi dan Operasional Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia; serta Ivanda Firdausy, S.Tr. K3., HSSE Enforcer PT Pelabuhan Tegar Indonesia (Marunda Center Terminal). Kegiatan ini turut dihadiri Capt. Korompus dari Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) serta diikuti para pemangku kepentingan dan praktisi K3 dari berbagai wilayah di Indonesia.

Melalui forum ini, ABUPI mendorong penguatan ekosistem pengelolaan K3 nasional di pelabuhan secara profesional dan kolaboratif melalui sinergi antara regulator dan pelaku usaha. ABUPI juga menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung implementasi K3 yang konsisten dan berkelanjutan guna mewujudkan pelabuhan Indonesia yang aman, efisien, dan berdaya saing global.



ABUPI MENGHADIRI SOSIALISASI PEMBENTUKAN KOMITE SEKTORAL SEKTOR TRANSPORTASI

TUJUAN DIBENTUKNYA KOMITE SEKTORAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- 01** Meningkatkan efektifitas koordinasi pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan sesuai arah kebijakan nasional di sektor transportasi
- 02** Meningkatkan efisiensi pelaksanaan koordinasi revitalisasi dengan melibatkan berbagai pihak (pemerintah, asosiasi profesi, industri, praktisi, akademisi) dalam satu forum kerja sektoral di sektor transportasi
- 03** Menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam pembentukan kelompok kerja komite sektoral, termasuk peran, struktur, dan mekanisme kerja di sektor transportasi
- 04** Menjamin keterlibatan pemangku kepentingan terkait secara terintegrasi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, sehingga kebutuhan industri dan pasar kerja dapat terakomodasi di sektor transportasi
- 05** Mendukung pencapaian target revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang efektif, menyeluruh, dan berkesinambungan melalui koordinasi lintas sektor di sektor transportasi

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menghadiri kegiatan Sosialisasi Pembentukan Komite Sektoral Sektor Transportasi yang diselenggarakan oleh BPSDM Kementerian Perhubungan pada Jumat, 9 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) sektor transportasi nasional.

Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun sinergi antara regulator dan pemangku kepentingan, termasuk asosiasi sektor transportasi dan kepelabuhanan, dalam memetakan kebutuhan serta menyusun standar kompetensi kerja yang selaras dengan perkembangan industri. Pembentukan Komite Sektoral diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi dalam memastikan standar kompetensi yang adaptif, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan dunia usaha.

URGENSI PEMBENTUKAN KOMITE SEKTORAL SEKTOR TRANSPORTASI

- 1 Kualitas dan kesiapan lulusan pendidikan dan pelatihan sektor transportasi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan nyata dunia kerja, sehingga masih diperlukan penyesuaian kompetensi agar lulusan benar-benar siap bekerja.
- 2 Keterlibatan dunia usaha dan industri transportasi dalam menentukan kebutuhan kompetensi, penyusunan kurikulum, dan pelaksanaan pelatihan masih belum optimal.
- 3 Standar kompetensi dan sertifikasi lulusan pendidikan dan pelatihan sektor transportasi belum sepenuhnya seragam dan terhubung langsung dengan kebutuhan industri.
- 4 Perkembangan teknologi transportasi, digitalisasi layanan, serta peningkatan standar keselamatan belum seluruhnya diikuti oleh pembaruan kurikulum dan program pelatihan secara cepat dan konsisten.

"Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pembentukan Komite Sektoral Sektor Transportasi yang mendukung program revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi dan sebagai wadah koordinasi serta sinkronisasi untuk memastikan pendidikan dan pelatihan menghasilkan SDM transportasi yang kompeten, siap kerja, dan sesuai kebutuhan sektor."

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

Dalam kesempatan tersebut, ABUPI menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh inisiatif pembentukan Komite Sektoral sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kualitas dan daya saing SDM maritim Indonesia. Partisipasi aktif ABUPI mencerminkan peran organisasi sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem transportasi dan kepelabuhanan yang profesional, berstandar, serta berdaya saing global.

PERESMIAN KANTOR DPD ACEH

Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) secara resmi melaksanakan peresmian Kantor DPD ABUPI Aceh sebagai bagian dari upaya memperkuat peran dan eksistensi organisasi di tingkat daerah. Peresmian ini menjadi momentum penting dalam memperluas jangkauan program kerja serta meningkatkan efektivitas koordinasi ABUPI di wilayah Aceh dan sekitarnya.



Dalam agenda tersebut, Dewan Pengurus Pusat (DPP) ABUPI hadir yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum I, Ariyanto Purboyo, didampingi oleh Ketua DPD ABUPI Aceh, Teuku Ali Devi. Kehadiran jajaran pengurus pusat dan daerah mencerminkan soliditas organisasi dalam memperkuat struktur kelembagaan hingga ke tingkat regional, sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam mendorong pertumbuhan sektor kepelabuhanan di daerah.

Peresmian kantor ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi, komunikasi, serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan kepelabuhanan di Aceh, termasuk pemerintah daerah, operator pelabuhan, penyedia jasa, dan pelaku usaha lainnya. Dengan adanya kantor tetap yang representatif, ABUPI berharap dapat menghadirkan pusat kegiatan organisasi yang lebih aktif dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan industri di wilayah tersebut.



Ke depan, keberadaan Kantor DPD ABUPI Aceh diharapkan mampu memperkuat kontribusi organisasi dalam pengembangan sektor maritim lokal, mendorong peningkatan daya saing pelabuhan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota dan pelaku usaha pelabuhan di Aceh. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi ABUPI dalam membangun organisasi yang lebih inklusif, terstruktur, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

ABUPI HADIRI INDOONESIAN MARITIME STAKEHOLDERS GATHERING YANG DISELENGGARAKAN INAMPA



Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menghadiri Indonesian Maritime Stakeholders Gathering yang diselenggarakan oleh Indonesian National Shipowners' Association (INAMPA) pada Kamis, 12 Februari 2026 di The Tavia Heritage Hotel, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum diskusi informal yang mempertemukan para pemangku kepentingan di sektor maritim.

Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar pelaku industri maritim, termasuk asosiasi, pelaku usaha, dan institusi terkait. Melalui forum ini, para peserta juga berbagi pandangan mengenai berbagai isu strategis di sektor kemaritiman serta menjajaki peluang kerja sama yang dapat mendukung pengembangan industri maritim nasional.

Kehadiran ABUPI dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen organisasi untuk terus mempererat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus mendorong terciptanya kolaborasi yang konstruktif dalam mendukung kemajuan sektor kepelabuhanan dan maritim Indonesia.



ABUPI DUKUNG PENGUATAN DIKLAT PANDU DALAM RAPAT EVALUASI BERSAMA BP3IP JAKARTA



Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menghadiri undangan Rapat Evaluasi Kerja Sama yang diselenggarakan oleh BP3IP Jakarta bersama para mitra kerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pandu.



Pertemuan strategis ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi, koordinasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan maritim, khususnya Diklat Pandu. Forum ini juga menjadi ruang diskusi konstruktif untuk memastikan kurikulum, standar kompetensi, dan kualitas pelatihan senantiasa selaras dengan kebutuhan industri kepelabuhanan.

Kehadiran ABUPI dalam rapat evaluasi tersebut merupakan wujud komitmen organisasi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) maritim yang andal, profesional, dan berdaya saing. Melalui kolaborasi erat dengan lembaga pendidikan dan pelatihan, ABUPI terus mendorong peningkatan kualitas kompetensi tenaga kepelabuhanan sebagai fondasi utama penguatan sektor maritim nasional.



ABUPI MENGHADIRI FGD PEMBENTUKAN KOMITE SEKTORAL, SEKTOR TRANSPORTASI



Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menghadiri agenda Focus Group Discussion (FGD) terkait Pembentukan Komite Sektoral Sektor Transportasi yang diselenggarakan oleh BPSDM Kementerian Perhubungan pada Jumat, 13 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian proses perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor transportasi nasional.

FGD tersebut bertujuan untuk memetakan peran, fungsi, serta ruang lingkup kerja Komite Sektoral sebagai wadah koordinasi antara regulator dan pemangku kepentingan industri. Forum ini juga menjadi sarana untuk menyelaraskan kebutuhan kompetensi tenaga kerja dengan dinamika dan tuntutan operasional di lapangan, khususnya di subsektor kepelabuhanan.



Kehadiran ABUPI dalam forum ini merupakan bentuk partisipasi aktif organisasi dalam memberikan perspektif dari sisi pelaku usaha pelabuhan. Masukan yang disampaikan diharapkan dapat memperkuat keselarasan antara program pengembangan SDM, penyusunan standar kompetensi, serta kebutuhan riil industri transportasi yang terus berkembang dan semakin kompetitif, seiring dengan transformasi digital dan tuntutan global.

Melalui diskusi ini, diharapkan tercipta koordinasi yang semakin solid antara regulator dan asosiasi dalam membangun sistem pengembangan kompetensi yang adaptif, terstruktur, dan berkelanjutan, guna mendukung peningkatan daya saing sektor transportasi nasional di tingkat regional maupun global, serta menjawab tantangan operasional dan regulasi ke depan.

BUP PT. PCM CILEGON TEKEN MOU DENGAN PT. KSP & BUP PT. KBS UNTUK PENGEMBANGAN PELABUHAN WARNASARI



PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) menandatangani kerja sama dengan PT Krakatau Sarana Properti (KSP) dan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) sebagai langkah awal mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Warnasari di Kota Cilegon. Kerja sama dengan KSP mencakup pemanfaatan lahan untuk akses jalan menuju Pelabuhan Warnasari, sementara dengan KBS berkaitan dengan rencana pengembangan pelabuhan.

Direktur Utama PT PCM, Muhammad Willy, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Pemerintah Kota Cilegon dan PT Krakatau Steel. Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci untuk memperlancar proses pembangunan pelabuhan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Wali Kota Cilegon, Robinsar, menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset lahan agar dapat mendukung kebutuhan pengembangan pelabuhan di masa mendatang. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya bersama untuk memaksimalkan potensi kawasan Warnasari melalui skema kerja sama yang akan dikaji lebih lanjut.



ABUPI HADIRI BRIEFING PERSIAPAN OCEAN IMPACT SUMMIT 2026 DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI



Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menghadiri undangan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam kegiatan Briefings on Concrete Deliverables for the Ocean Impact Summit (OIS) 2026 yang diselenggarakan di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju penyelenggaraan Ocean Impact Summit 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 8–9 Juni 2026 di Bali.

Kegiatan briefing dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno, bersama perwakilan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Pertemuan ini membahas perkembangan persiapan OIS 2026 sekaligus menjajaki berbagai peluang keterlibatan strategis dari sektor pemerintah, dunia usaha, lembaga internasional, dan organisasi industri dalam mendukung agenda ekonomi biru (blue economy).

Ocean Impact Summit 2026 sendiri akan mengangkat tema “Unlocking the Potential of the Blue Economy”, dengan tujuan mempertemukan para pemimpin global, sektor swasta, lembaga keuangan, organisasi internasional, serta masyarakat sipil untuk memperkuat kemitraan dan mendorong investasi yang berdampak pada pengelolaan laut yang berkelanjutan.

Partisipasi ABUPI dalam forum ini mencerminkan komitmen asosiasi dalam mendukung penguatan kolaborasi pengembangan ekonomi biru serta mendorong peran sektor kepelabuhanan dalam ekosistem maritim yang berkelanjutan. ABUPI juga berharap keterlibatan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional dalam memajukan sektor maritim Indonesia.



Anggota ABUPI



Strategic Partner



Pelayanan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI)

1



Konsultasi dan Asistensi

ABUPI menyediakan layanan konsultasi dan asistensi untuk membantu anggota dalam memenuhi standar operasional dan regulasi kepelabuhanan, seperti Perizinan, Pendampingan Koneksi, Penetapan/Penyesuaian Tarif.

2



Peningkatan dan Pengembangan SDM

ABUPI fokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) anggota melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan. Tujuannya adalah agar SDM di lingkungan badan usaha pelabuhan memiliki kompetensi yang siap pakai dan sesuai dengan kebutuhan industri.

3



Kerja Sama / Kemitraan

ABUPI mendorong kerja sama antara anggota dan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan BUMN, untuk pengembangan dan pengelolaan pelabuhan.

4



Pembiayaan

ABUPI membantu anggota dalam mencari solusi pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur pelabuhan. Melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), anggota dapat mengakses pendanaan dari pemerintah dan swasta untuk pembangunan dan pengelolaan pelabuhan.